Resume Mata Kuliah Hukum Tata Negara

Nama : Muti'a Khaerani

Nim : 10200120221

Materi ke 1

Istilah hukum tata negara

Di Belanda umumnya menggunakan istilah “**staatsrech**” yang terbagi menjadi **staatsrech in ruimere zin** (dalam arti luas) dan **staatsrech in engere zin** (dalam arti sempit). **Staatsrech in ruimere zin** adalah Hukum Negara. Sedangkan **staatsrech in engere zin** merupakan hukum yang membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Pemerintahan.

Di Inggris pada umumnya menggunakan istilah “**Constitutional Law**”, penggunaan istilah tersebut didasarkan pada alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusional lebih mengemuka.

Di Prancis, orang menggunakan istilah “**Droit Constitutionnel**” sebagai lawan dari “**Droit Administratif**”, di mana titik awalnya adalah untuk membedakan antara Hukum Konstitusi dan Hukum Administrasi Negara.

Di Jerman menggunakan istilah **Verfassungsrecht**: Hukum Konstitusi dan **Verwaltungsrecht**: Hukum Administrasi Negara.

Pengertian hukum tata negara

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut.

Adapun definisi hukum tata negara menurut beberapa para ahli :

Wade and Phillips

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya yang berjudul “**Constitutional law**” yang terbit pada tahun 1936 .

Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat Hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan

akhirnya menunjukan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Konstitusi

Ruang lingkup hukum tata negara yang pertama adalah pembahasan mengenai konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar merupakan hal utama yang dibahas di dalam hukum tata negara. Jika mengacu kepada pengertian hukum tata negara, maka harus ada sebuah peraturan dasar yang mengatur mengenai tatanan struktur negara, mekanisme hubungan antar struktur organ kenegaraan dan hubungan struktur negara dengan warga negara.

Lembaga Negara

Ruang lingkup hukum tata negara selanjutnya adalah lembaga-lembaga yang terdapat di dalam suatu negara.

Struktur Kelembagaan

Ruang Lingkup selanjutnya adalah struktur kelembagaan. Masing-masing negara telah mengatur struktur lembaga negara di dalam konstitusinya.

Mekanisme Kerja

Ruang lingkup selanjutnya adalah mekanisme kerja dari masing-masing lembaga negara berdasarkan tugas dan wewenangnya yang telah diatur oleh konstitusi atau undang-undang.

Hubungan Antara Lembaga Negara

Ruang lingkup selanjutnya adalah mekanisme hubungan antara lembaga yang terdapat di dalam suatu negara. Dalam ruang lingkup ini akan dibahas mengenai mekanisme hubungan dari masing-masing lembaga negara baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kemudian hubungan dalam bidang pengawasan dan pertanggungjawaban dan pelaporan terkait dengan tugas dari masing-masing lembaga negara.

Hubungan HTN dengan ilmu lainnya:

ilmu Negara

“ilmu negara” diambil dari istilah bahasa Belanda Staatler yang berasal dari istilah bahasa Jerman Staatslehre dalam bahasa Inggris disebut theory of state dalam bahasa Perancis Theorie d’etat. Ilmu Negara adalah menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang Negara dan hukum tata Negara. George Jellinek dikenal sebagai Bapak Ilmu Negara. Membagi ilmu kenegaraan menjadi dua bagian, yaitu : a) ilmu Negara dalam arti sempit staatswissenschaften b) ilmu pengetahuan hukum rechtswissenschaften

ilmu pengetahuan hukum rechtswissenschaften menurut Jellinek adalah Hukum public yang menyangkut soal kenegaraan, misalnya Hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum pidana, dan sebagainya.

Ilmu Politik

Menurut Hoetink bahwa ilmu politik adalah semacam sosiologi Negara. Ilmu Negara dan hukum tata Negara menyelidiki kerangka yuridis dari Negara, sedangkan ilmu politik menyelidiki bagiannya yang ada di sekitar kerangka itu. Maka kedua-duanya menggambarkan bahwa masing-masing menyelidiki obyek yang sama yaitu Negara, perbedaan hanya pada metode yang digunakan. Dimana ilmu Negara metosenya adalah yuridis sedangkan ilmu politik adalah sosiologis

Materi ke 2

Sumber-sumber hukum tata negara

Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum bermacam-macam pengetahuan adalah tergantung pada sudut mana kita melihatnya. Namun demikian sebagai gambaran berikut dua pakar hukum dibawah ini sebagai gambaran tentang sumber hukum

Menurut Joeniarso bahwa sumber hukum dapat dibedakan menjadi :

- sumber hukum dalam artian sebagai asal hukum positif, wujudnya dalam bentuk yang konkrit berupa keputusan dari yang berwenang
- sumber hukum dalam artian sebagai tempat ditemukannya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif. Entah tertulis atau tak tertulis.
- sumber hukum yang dihubungkan dengan filsafat, sejarah, dan masyarakat. Kita dapatkan sumber hukum filosofis histories dan sosiologis.

bahwasanya sumber hukum tata Negara tidak terlepas dari pada sumber hukum formil dan materil

pertama, sumber hukum materil tata Negara adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum tata Negara, yaitu:

- dasar dan pandangan hidup bernegara seperti pancasila
- kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah hukum tata Negara. Seperti halnya dengan kekuatan dalam proses perumusan dan perancangan perundang-undangan yang tidak lepas dari pada kepentingan kelompok partai dalam merumuskan hukum.

Kedua, sedangkan sumber hukum dalam arti formal, yaitu

- a. hukum perundang-undangan ketatanegaraan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis
- b. hukum adat ketatanegaraan merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang tertulis, namun tumbuh dan dipertahankan oleh masyarakat hukum adat.
- c. hukum adat kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan Negara untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menghidupkan (mendingkalisasi) kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.
- d. yurisprudensi ketatanegaraan adalah kumpulan putusan-putusan pengadilan.
- e. Trakta atau hukum perjanjian internasional ketatanegaraan adalah persetujuan yang diadakan Indonesia dengan Negara-negara lain,

f. doktrin ketatanegaraan ajaran-ajaran tentang hukum tatanegara yang ditemukan dan dikembangkan di dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran saksama berdasarkan logika formal yang berlaku.

HIRARKHI PERUNDANG UNDANGAN

Pasal 7 (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa; Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah.

Hirarki perundang undangan menurut TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengembalian kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.
3. Undang-Undang (UU) dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta TAP MPR-RI
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut: a). Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. B). DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan. C). Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.
5. Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang
6. Keputusan Presiden (Keppres) Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan
7. Peraturan Daerah Peraturan daerah propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi bersama dengan gubernur.

Materi ke 3

Asas-asas hukum tata negara

1. Asas Pancasila

Asas Pancasila merupakan prinsip dasar dan utama dalam kehidupan negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman hidup dan memiliki 5 butir nilai, yang mana aturan manapun termasuk undang-undang harus mengikutinya.

5 butir nilai Pancasila diantaranya:

- 1.Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2.Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3.Persatuan Indonesia
- 4.Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan
- 5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Apabila suatu undang-undang dibentuk dengan menyalahi asas Pancasila, maka aturan tersebut wajib untuk dicabut, tidak diberlakukan atau direvisi.

Fungsi Asas Pancasila

- 1.Pancasila dijadikan sebagai jiwa dari bangsa Indonesia, sehingga setiap visi dan misi selalu menjunjung asas Pancasila.
- 2.Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia, sebagai identitas nasional, dimana tutur kata dan perilaku rakyat Indonesia merupakan cerminan dari asas Pancasila.
- 3.Pancasila dijadikan pandangan bangsa Indonesia dalam hidup bernegara.
- 4.Pancasila sebagai dasar negara dimana semua sistem pemerintahan berlangsung dengan berlandaskan asas Pancasila.
- 5.Pancasila dijadikan sumber dari semua sumber hukum yang ada di Indonesia, sehingga dalam pembuatan aturan harus mengikuti asas Pancasila.
- 6.Pancasila sebagai perjanjian luhur ketika didirikannya negara Indonesia.

Pancasila dijadikan sebagai cita-cita bangsa Indonesia menuju negara yang sejahtera, adil dan makmur.

2. Asas Negara Hukum

Asas negara hukum menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum.Pernyataan ini juga disampaikan di Undang-undang Dasar 1945.Negara hukum bermakna bahwa suatu negara tersebut memihak akan keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan atas dasar kekuasaan pemerintah semata.

Fungsi Asas Negara Hukum

- 1.Dengan adanya asas negara hukum, suatu negara akan lebih melindungi hak asasi manusia.
- 2.Pemerintahan akan berdasarkan pada aturan yang berlaku.
- 3.Adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan negara demi menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
- 4.Rakyat akan tunduk pada aturan hukum sehingga meminimalisir pelanggaran sosial dan norma.

3. Asas Negara Kesatuan

Asas negara kesatuan merupakan prinsip dasar bahwa suatu negara tersebut merupakan negara berdaulat sebagai satu kesatuan.

Negara kesatuan menjadikan suatu pemerintahan pusat adalah puncak dari segala pemerintahan dan kekuasaan yang ada dipilih oleh pemerintah pusat.

Fungsi Asas Negara Kesatuan

1. Dengan adanya asas negara kesatuan, segala kekuasaan tergabung dalam pusat pemerintahan.
2. Apabila adanya serangan, negara akan bersatu melawan tanpa memecah belah masing-masing.
3. Ada bagian-bagian tersendiri yang mengatur dalam menegakkan keadilan
4. Menjadikan tujuan negara dalam 1 fokus yakni mencerdaskan kehidupan dan melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

4. Asas Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan memiliki arti lain sebagai kekuasaan pemerintahan. Asas kedaulatan rakyat berarti prinsip negara yang menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Asas ini tertuang dalam UUD 1945 yang menjelaskan bahwa pemikiran dan ide berasal dari rakyat, atas persetujuan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Fungsi Asas Kedaulatan Rakyat

1. Dengan diterapkannya asas kedaulatan rakyat, maka kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat.
2. Rakyat paham atas kondisi mereka sehingga bisa tau bagaimana cara tepat untuk mensejahterakan kehidupan.
3. Rakyat dapat mengatur pemerintah untuk menuju kesejahteraan tanpa harus terinjak kekuasaan.

5. Asas Pembagian Kekuasaan

Asas pembagian kekuasaan menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki prinsip membagi kekuasaan di setiap daerah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kekuasaan semena-mena yang dilakukan oleh satu pemimpin atau kelompok. Oleh karenanya dibagilah kekuasaan tersebut untuk mencegah pemimpin atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Meski begitu, masing-masing kekuasaan tetap saling bekerja sama satu sama lain.

Fungsi Asas Pembagian Kekuasaan

1. Dengan diterapkannya asas pembagian kekuasaan, masing-masing pemimpin atau kelompok lebih terfokus pada pekerjaannya.
2. Kekuasaan stabil dan tidak timpang sebelah akibat pemimpin atau kelompok memiliki banyak kuasa.
3. Mencegah adanya penyalahgunaan kuasa.

Materi ke 4

Sejarah ketatanegaraan Indonesia

Perkembangan ketatanegaraan dapat dibagi menjadi beberapa periode, sejak masa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Walaupun sebenarnya tonggak ketatanegaraan Indonesia telah ada jauh sebelum proklamasi. Secara formal, periode perkembangan ketatanegaraan itu dapat dirinci sebagai berikut.

1. Periode berlakunya UUD 1945 (Agustus 1945-27 Desember 1949)
2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
3. Periode berlakunya UUD 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
4. Periode berlakunya kembali UUD 1945 (5 Juli 1959-Sekarang)

Pada periode ini pun terbagi menjadi beberapa periode, yaitu :

- a. Periode Order Lama (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
- b. Periode Order Baru (11 Maret 1966-21 Mei 1998)
5. Periode Reformasi (21 Mei 1998-Sekarang)

1. Periode Undang-Undang Dasar 1945

Bentuk negara Republik Indonesia pada kurun waktu 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945 adalah Negara Kesatuan. Landasan yuridis negara kesatuan Indonesia antara lain sebagai berikut .

a. Pembukaan UUD 1945 alinea 4, yang berbunyi:

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...” Hal tersebut menunjukkan satu kesatuan bangsa Indonesia dan satu kesatuan wilayah Indonesia .

b. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi :

“ Negara Republik Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.” Kata Kesatuan dalam pasal tersebut menunjukkan bentuk negara, sedangkan Republik menunjukkan bentuk pemerintahan. UUD 1945 tidak menganut teori pemisahan kekuasaan secara murni seperti yang diajarkan Montesquieu dalam ajaran Trias Politika. UUD 1945 lebih cenderung menganut prinsip Pembagian Kekuasaan (Distribution of Power). Dalam prinsip Pembagian Kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya masih dimungkinkan adanya kerja sama menjalankan tugas-tugasnya.

Menurut UUD 1945, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kekuasaan-kekuasaan dalam negara di kelola oleh lima lembaga, yaitu .

- a. Legislatif, yang dilakukan oleh DPR.
- b. Eksekutif, yang dijalankan oleh presiden.
- c. Konsultatif, yang dijalankan oleh DPA.
- d. Eksaminatif (mengevaluasi), kekuasaan inspektif (mengontrol), dan kekuasaan auditatif (memeriksa), yang dijalankan oleh BPK.
- e. Yudikatif, yang dijalankan oleh Mahkamah Agung.

2. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949

Menurut ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam Konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem ini, Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), dan apabila pertanggungjawaban itu tidak diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka dapat menyebabkan bubarnya kabinet. Jadi, kedudukan kabinet bergantung kepada DPR.

Dengan demikian, yang membedakan sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer adalah sebagai berikut.

a. Sistem pemerintahan presidensial yang menjadi kepala negara pasti seorang presiden, sedangkan dalam pemerintahan parlementer yang menjadi kepala negara bisa presiden, raja, atau kaisar.

b. Sistem pemerintahan parlementer, pemerintah bertanggung jawab dan berada di bawah pengawasan parlemen, sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen / DPR.

Sejarah sistem pemerintahan parlementer di Indonesia telah dimulai sejak periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama. Tepatnya sejak dikeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Akibatnya, kekuasaan pemerintahan bergeser dari tangan presiden kepada menteri atau menteri-menteri . setiap undang-undang yang dikeluarkan harus terdapat tanda tangan menteri (contra seign ministry). Dengan demikian, presiden tidak dapat di ganggu- gugat. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab dalam penetapan suatu undang-undang adalah para menteri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Konstitusi RIS 1949, dapat di simpulkan bahwa Konstitusi RIS 1949, dipengaruhi oleh Montesquieu, namun tidak menganut teori tersebut secara murni. Konstitusi RIS 1949 menganut Pembagian Kekuasaan, sedangkan Montesquieu menganjurkan Pemisahan kekuasaan. Selain itu, kekuasaan negara bukan hanya terbagi dalam tiga kekuasaan/lembaga, tetapi terbagi dalam 6 lembaga negara. Berikut ini keenam lembaga negara sebagai alat-alat perlengkapan federal RIS, yaitu sebagai berikut.

a. Presiden.

b. Menteri-menteri.

c. Senat.

d. Dewan Perwakilan Rakyat.

e. Mahkamah Agung Indonesia

f. Dewan Pengawas keuangan.

Menurut Konstitusi RIS 1949 bahwa kekuasaan pembentukan perundang-undangan federal dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan senat terhadap undang-undang yang isinya melibatkan beberapa negara/daerah bagian atau antara pemerintah federal dengan negara/daerah bagian. Untuk undang-undang yang isinya di luar itu, cukup dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR.

Oleh karena itu, agar suatu undang-undang mempunyai kekuatan mengikat maka harus disetujui

oleh DPR dan senat serta disahkan oleh pemerintah. Dalam hal pengesahan ini suatu undang-undang selain ditandatangani oleh presiden juga ditandatangani oleh menteri yang bertanggung jawab terhadap materi undang-undang tersebut.

Dengan demikian, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan senat dalam melaksanakan kekuasaan legislatif harus bekerja sama, Demikian pula pemerintah, dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan harus benar-benar memperhatikan suara Dewan Perwakilan Rakyat . jadi, dalam hal ini antara pemerintahan dan DPR dan senat terdapat hubungan yang bersifat kerja sama.

3.Periode UUDS 1950

Bentuk negara yang dianut Negara Indonesia pada masa berlakunya bentuk UUDS 1950 adalah negara kesatuan. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang berbunyi, “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.

Bentuk negara kesatuan merupakan kehendak rakyat Indonesia. Hal ini dikemukakan dalam UU No. 7 Tahun 1950. Selain itu, pada bagian Mukaddimah UUDS 1950 alinea 4 disebutkan : “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk Republik Kesatuan...”

Sistem pemerintahan yang dianut oleh UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang digunakan pada masa Konstitusi RIS 1949 masih dipertahankan oleh UUDS 1950. Sebagai dasar hukum UUDS 1950 mengatur sistem pemerintahan parlementer, dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan berikut ini.

Dalam pasal 45 disebutkan “Presiden ialah Kepala Negara”. Karena presiden sebagai kepala negara, ia tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas pelaksanaan pemerintahan. Pernyataan pasal 45 tersebut kemudian dipertegas oleh pasal 83 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- (1) Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat;
- (2) Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

Masa berlakunya UUDS 1950 diisi dengan jatuh banggunya kabinet sehingga pemerintahan tidak stabil. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut.

- a. Adanya sistem pemerintahan parlementer yang disertai sistem multipartai (banyak partai).
- b. Perjuangan partai-partai politik hanya untuk berkepentingan golongan atau partainya.
- c. Pelaksanaan sistem demokrasi yang tidak sehat.

Oleh karena itu, baik UUD RIS maupun UUD 1950 menggunakan Pancasila sebagai dasar negara hanya dalam ketentuan formal, sedangkan jiwa kekeluargaannya belum mampu dilaksanakan secara operasional.

Pada masa berlakunya UUDS 1950, kekuasaan-kekuasaan negara dipegang oleh beberapa alat perlengkapan negara. Hal ini berarti kekuasaan dalam negara tidak dipegang atau dipusatkan pada satu badan atau lembaga.

Berdasarkan Pasal 44 UUDS 1950, alat-alat perlengkapan negara adalah sebagai berikut :

- a. Presiden dan Wakil Presiden

- b. Menteri-menteri
- c. Dewan Perwakilan Rakyat
- d. Mahkamah Agung
- e. Dewan Pengawas Keuangan.

Sebagaimana undang-undang dasar sebelumnya, dalam UUDS 1950 pun menganut ajaran pembagian kekuasaan. Hal ini terbukti dengan ditentukannya badan-badan yang memegang ketiga kekuasaan tersebut.

- a. Kekuasaan pemerintah negara (eksecutive power) dilakukan oleh dewan menteri.
- b. Kekuasaan perundang-undangan (legislative power) dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR.
- c. Kekuasaan kehakiman (yudicative power) dilakukan oleh Mahkamah Agung.

pasal 84 UUDS 1950, menyatakan bahwa : “Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”, dengan ketentuan harus mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari. UUDS 1950 inipun bersifat sementara yang ditegaskan dalam pasal 134 bahwa, “Konstituante bersama-sama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara ini”. Badan Konstituante yang disertai tugas membuat undang-undang dasar baru tetap tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Keadaan ini memancing berkembangnya persaingan politik yang membawa akibat luas dalam berbagai tata kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Situasi gawat itu mendorong presiden mengajukan konsepsinya mengenai sistem Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Konsepsi itu disampaikan di depan sidang pleno DPR hasil Pemilu tahun 1955.

Perdebatan terus berlarut-larut tanpa menghasilkan suatu keputusan penting, sementara keadaan negara semakin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia. Keadaan itu mendorong Presiden Soekarno menggunakan wewenangannya, yakni dengan mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang berisi :

- a. Pembubaran Badan Konstituante
- b. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
- c. Pembentukan MPR dan DPA sementara.

4. Periode Berlakunya Kembali UUD 1945

a. Periode Orde Lama (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966)

Para pembentuk UUDS 1950 sejak semula menyebutkan bahwa UUD tersebut masih bersifat sementara. Hal ini ditegaskan dalam pasal 134 yang berbunyi : “Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini”.

Pada dasarnya, saran untuk kembali kepada UUD 1945 tersebut dapat diterima oleh para anggota Konstituante, namun dengan pandangan yang berbeda. Pertama, menerima saran untuk kembali kepada UUD 1945 secara utuh. Kedua, menerima untuk kembali kepada UUD 1945 tetapi dengan

amandemen, yaitu sila ke satu Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 harus diubah dengan sila ke satu Pancasila seperti tercantum dalam Piagam Jakarta. Adapun prosedur untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diputuskan oleh Kabinet Karya adalah sebagai berikut :

- 1)Setelah terdapat kata sepakat antara Presiden dan Dewan Menteri maka pemerintah minta supaya diadakan sidang pleno Konstituante.
- 2)Atas nama pemerintah, disampaikan oleh presiden amanat berdasarkan pasal 134 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 kepada Konstituante yang berisi “anjuran” supaya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ditetapkan.
- 3)Jika anjuran itu diterima oleh Konstituante, pemerintah atas ketentuan pasal 137 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mengumumkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 itu dengan keluhuran. Pengumuman dengan keluhuran itu dilakukan dengan suatu piagam yang ditanda tangani dalam suatu sidang pleno Konstituante di Bandung oleh presiden, para menteri, dan para anggota Konstituante, yang antara lain memuat Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945.

oleh karena pemilihan umum yang sedianya akan diselenggarakan pada 5 Juli 1968 tertunda sampai 5 Juli 1971 dan mengingat telah dikeluarkannya ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Tangan Presiden Soekarno. Demi terciptanya kepemimpinan nasional yang kuat dan terselenggaranya kestabilan politik, ekonomi dan hankam dikeluarkanlah Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang pengangkatan pengembal ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara No. IX/MPRS/1966 sebagai presiden republik Indonesia, yang antara lain menyatakan : “Mengangkat jenderal Soeharto sebagai presiden republik Indonesia sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum”

b.Periode Orde Baru (11 Maret – 21 Mei 1998)

Setelah turunnya Presiden Soekarno dari tampuk kepresidenan, maka berakhirilah orde lama. Kepimpinan disahkan kepada jenderal Soeharto mulai memegang kendali pemerintahan dan menanamkan era kepemimpinan sebagai orde baru. Diera ini konsentrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan dan kehisupan demokrasi menitikberatkan kepada aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Untuk mencapai titik tolak tersebut, dilakukanlah upaya-upaya pembenahan sistem ketatanegaraan dan format politik yang pada prinsipnya mempunyai sejumlah sisi yang menonjol yaitu :

- 1)Adanya konsep dwi fungsi ABRI
- 2)Pengutamaan Golongan Karya
- 3)Magnifikasi kekuasaan ditangan eksekutif
- 4)Diteruskannya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat
- 5)Kebijaksanaan depolitisasi khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep massa mengambang (floating mass)
- 6)Kontrol atas kehidupan pers.

Dalam teori perundang-undangan dikenal adanya dua jenis Ketetapan MPR jika ditinjau dari sifatnya, yaitu Ketetapan MPR yang bersifat perundang-undangan dan Ketetapan MPR yang bersifat bukan perundang-undangan. Ketetapan MPR yang memberikan mandat presiden, pada hakikatnya tidak dapat dikategorikan bersifat perundang-undangan. Hal ini mengingat suatu produk hukum disebut perundang-undangan, kalau bersifat dan mengikat umum. Ketetapan tersebut sifatnya kongkrit, individual, dan final. Oleh sebab itu, ketetapan MPR yang mengangkat Soeharto sebagai Presiden bisa dikatakan mirip dengan Ketetapan Tata Usaha Negara. Berdasarkan sifat seperti itulah, peralihan Jabatan Presiden dari Soeharto kepada Wakil Presiden (B. J. Habibie) harus diawali dengan penyerahan mandat (Ketetapan MPR) terlebih dahulu. Pendek kata mandat sebagaimana digariskan oleh Ketetapan MPR tidak dapat dialihkan begitu saja. Walaupun demikian, pemerintahan tetap jalan dengan mengangkat B.J. Habibie sebagai Presiden RI ketiga.

5. Periode Reformasi

Setelah “tumbangnya” Orde Baru maka dimulailah pentahapan konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia. Konsolidasi tersebut antara lain adalah melakukan perubahan dan penggantian berbagai peraturan perundang-undangan yang dirasa tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan atau penggantian bahkan dihilangkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum.
- b. Undang-Undang No. 5 tahun 1985 tentang Referendum.
- c. Undang-Undang di bidang politik (UU Susduk MPR/DPR/DPRD, UU Pemilihan Umum, UU Partai politik dan Golongan Karya). Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susduk MPR/DPR/DPRD, UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, dan UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- d. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan di Daerah, diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang sering disebut sebagai Undang-undang tentang Otonomi Daerah.

setelah UUD 1945 diamandemen, terdapat perubahan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang cukup fundamental. Perubahan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut.

- a. Sistem pemerintahan negara menggunakan sistem presidensial murni.
- b. Presiden dan/atau wakil presiden serta parlemen yang terdiri atas dua kamar dipilih
- c. Di bidang politik, kedudukan presiden dan/atau wakil presiden serta parlemen sama-sama kuat. Artinya antara kedua lembaga ini tidak bisa saling menjatuhkan.
- d. Dikenal adanya lembaga peradilan konstitusi, yakni Mahkamah Konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan impeachment kepada presiden dan/atau wakil presiden jikalau ditengarai telah melakukan pelanggaran hukum berat. Hal ini berarti presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat dijatuhkan, jika melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat yuridis.

e. Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada presiden dan/atau wakil presiden kepada parlemen harus diawali dengan adanya pertanggungjawabkan hukum (yuridis). Adapun untuk pertanggungjawaban politis merupakan konsekuensi logis, jika presiden dan/atau wakil presiden telah melaksanakan pertanggungjawaban hukum tersebut. Hal ini berarti telah mengubah paradigma yang selama ini mewarnai sistem pertanggungjawaban presiden dan/atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam paradigma lama, pertanggungjawaban presiden dan/atau wakil presiden lebih menekankan pada pertanggung jawaban politis.

Materi ke 5

Konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sehingga konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, dengan demikian suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yaitu negara.

***Nilai Konstitusi**

Karl Loewenstein mengadakan suatu penyelidikan mengenai apa arti dari suatu konstitusi tertulis (UUD) dalam suatu lingkungan nasional, terutama bagi rakyat biasa sehingga membawanya kepada tiga jenis penilaian konstitusi sebagai berikut:

1. Nilai Normatif

Nilai ini diperoleh apabila penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar secara murni dan konsekuen, konstitusi itu ditaati dan dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikitpun.

2. Nilai Nominal

Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna. Sebab-sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.

3. Nilai Semantik

Suatu konstitusi bernilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum berlaku namun dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi konstitusi tersebut hanyalah sekedar suatu istilah belaka, sedang dalam pelaksanaannya hanyalah dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa.

***Sifat Konstitusi**

1. Bersifat Luwes/Fleksibel

Konstitusi yang bersifat luwes atau fleksibel adalah konstitusi yang baik, karenanya dapat dengan mudah menerima perubahan apabila diperlukan sekali, serta dengan mudah pula dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

2. Tertulis dan Tidak Tertulis

1. Bersifat tidak tertulis:

Suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal,. Seperti konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, dan New Zealand.

2. Bersifat tertulis:

Konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa dokumen formal.

*Muatan Konstitusi

Menurut A.A.H. Struycken, Undang-Undang Dasar (Groundwet) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang
4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

*Perubahan konstitusi

sebagaimana yang dikemukakan oleh K.C. Wheare, yaitu melalui cara berikut:

1. Perubahan konstitusi yang terjadi akibat kekuatan-kekuatan yang bersifat primer (some primary forces), seperti dorongan faktor politik.
2. Perubahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi (formal amendment).
3. Perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim atau pengadilan (judicial interpretation).
4. Perubahan konstitusi oleh suatu kebiasaan dan konvensi yang lahir apabila ada kesepakatan rakyat (usage and convention).

Berdasarkan pendapat di atas dapat kita simpulkan terdapat dua macam perubahan konstitusi, pertama perubahan secara formal yakni formal amendment, dan kedua perubahan di luar cara formal yakni some primary force, judicial interpretation, dan usage and convention.

Materi ke 6

Organ dan fungsi kekuasaan negara

Lembaga atau organ negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the State Organ dalam bukunya General Theory of Law and State. Hans Kelsen menguraikan bahwa "Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (normcreating) dan/atau bersifat menjalankan norma (norm applying).

Cabang Kekuasaan Legislatif

1. Fungsi Pengaturan (Legislatif)

Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislative. Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, (i) pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara; (ii) peraturan yang dapat membebani harta

kekayaan warga negara; dan (iii) pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara. Yang biasa disebut sebagai fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Dalam bentuk konkretnya, fungsi pengaturan ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang. Peraturan yang paling tinggi di bawah undang-undang dasar haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif.

Fungsi legislatif juga menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu:

- a. Prakarsa pembuatan undang-undang
- b. Pembahasan rancangan undang-undang
- c. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang
- d. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Cabang Kekuasaan Yudisial

Kedudukan Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini sering kali disebut cabang kekuasaan “yudikatif”. Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau judiciary merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Pemisahan kekuasaan juga terkait erat dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan, dalam memahami dan menafsirkan undang-undang dasar dan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik para perumus undang-undang dasar dan undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan.

Dalam sistem peradilan di Indonesia dewasa ini, terdapat empat lingkungan peradilan, yang masing-masing mempunyai lembaga-lembaga pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, dan tingkat kasasi, semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat pertama dan kedua dalam keempat

Cabang Kekuasaan Eksekutif

1. Sistem Pemerintahan

Cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam hubungan ini, di dunia dikenal adanya tiga sistem pemerintahan negara: (i) sistem pemerintahan presidential; (ii) sistem pemerintahan parlementer atau sistem kabinet; dan (iii) sistem campuran. Sistem pemerintahan itu dikatakan bersifat parlementer apabila (a) sistem kepemimpinannya terbagi dalam jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan yang terpisah dan (b) jika sistem pemerintahannya ditentukan harus bertanggung jawab kepada parlemen sehingga dengan demikian (c) kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapat dukungan parlemen dan sebaliknya (d) parlemen juga dapat dibubarkan oleh Kepala Negara apabila dianggap tidak dapat memberikan dukungan kepada pemerintah.